

MENGANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT KEMISKINAN DI
PROVINSI LAMPUNG (TAHUN 2011-2015)



Disusun oleh :

Meidia Afiani

2216041093

Reguler C

UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
2022/2023

A. Latar belakang

Permasalahan ketimpangan ekonomi telah lama menjadi permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi yang dipimpin oleh sejumlah negara miskin dan berkembang. Banyaknya dari negara berkembang yang mengalami pertumbuhan ekonomi tinggi pada tahun 1960an mulai menyadari bahwa pertumbuhan tersebut tidak bisa membantu menyelesaikan masalah kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan kemiskinan absolut. Pemecahan Masalah tentang pendapatan mempunyai dua aspek. Yang pertama adalah bagaimana meningkatkan kehidupan masyarakat yang masih berada di bawah garis kemiskinan, sedangkan yang kedua adalah tentang pemerataan pendapatan secara keseluruhan dalam arti mengurangi kesenjangan pendapatan antar masyarakat atau rumah tangga. Keberhasilan penanganan masalah pertama adalah mengurangi proporsi penduduk yang masih hidup di bawah garis kemiskinan. Sedangkan keberhasilan perbaikan distribusi pendapatan pada umumnya tergantung pada laju pertumbuhan pendapatan masyarakat miskin yang lebih besar dibandingkan dengan laju pertumbuhan pendapatan masyarakat kaya.

Kemiskinan, adalah masyarakat yang selalu lemah kemampuannya dalam berusaha, kurang informasi mengenai kegiatan ekonomi, sehingga seringkali tertinggal jauh dari masyarakat yang mempunyai potensi lebih tinggi. Bagong Suyanto kemudian membagi kemiskinan menjadi dua kategori, yaitu kemiskinan absolut (di bawah kelas menengah) dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut merupakan suatu kondisi dimana masyarakat hanya dapat memenuhi kebutuhan dasarnya (pangan, sandang, dan papan). Kemiskinan relatif dinyatakan sebagai persentase pendapatan nasional yang diterima penduduk kelompok. Artinya kemiskinan relatif merupakan suatu kondisi menjadi miskin karena dampak kebijakan pembangunan belum menjangkau seluruh masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan masalah pendapatan.

Menurut UU Nomor 24 Tahun 2004, kemiskinan ialah status sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak dihormati hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Kebutuhan dasar yang menjadi hak seseorang atau sekelompok orang antara lain kebutuhan akan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air minum, tanah, sumber daya

alam, lingkungan hidup, rasa aman dalam menghadapi perlakuan atau ancaman. kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam organisasi kehidupan politik dan sosial.

Menurut Bank Dunia, salah satu penyebab kemiskinan adalah kekurangan pendapatan dan harta (Kurang nya penghasilan dan harta) agar dapat memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, perumahan, kesehatan pendidikan yang dapat diterima. berkaitan dengan terbatasnya kesempatan kerja dan umumnya bagi mereka yang tergolong miskin (Miskin) yang tidak mempunyai pekerjaan (pengangguran), oleh karena itu Tingkat pendidikan dan kesehatan mereka umumnya kurang memadai. Mengatasi Permasalahan kemiskinan tidak dapat dipisahkan dari permasalahan lainnya pengangguran, pendidikan, kesehatan dan masalah terkait lainnya jelas berkaitan dengan masalah kemiskinan. Dengan kata lain Pendekatan ini harus dilakukan secara terpadu lintas sektor dan actor tersinkronisasi dan terintegrasi. Merujuk pada strategi pengatasan kemiskinan nasional, definisi Kemiskinan adalah keadaan seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, hak-hak dasar mereka dilindungi dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Definisi ini berasal dari pendekatan berbasis hak yang mengakui hal tersebut Masyarakat miskin menikmati hak-hak dasar yang sama dengan anggota perusahaan lain. Selain itu, kemiskinan juga terkena dampaknya Ada beberapa faktor yang antara lain menyebabkan struktur politik kurang berkeadilan mengenai aksesibilitas masyarakat miskin, lingkungan budaya dan sosial, serta bencana alam. Kemiskinan tidak lagi dipandang hanya sebagai hambatan ekonomi, tetapi juga kurangnya rasa hormat terhadap hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan seseorang atau sekelompok orang yang hidup bermartabat.

Di provinsi lampung masyarakat miskin juga masih cukup banyak. Hal ini terbukti dari fasilitas yang mereka miliki seperti masih banyak masyarakat yang tinggal dirumah yang berlantai tanah serta berdinding kayu atau papan, sedangkan makan mereka paling banyak dua kali dalam sehari serta mereka tidak memiliki WC sendiri melainkan WC umum, artinya masyarakat masih banyak yang miskin.

Menurut data Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung yang telah diterbitkan, masalah yang dihadapi oleh provinsi Lampung adalah rendahnya Indeks Pembangunan Manusia. Data yang menunjukkan selama tahun 2011 – 2015 Provinsi

Lampung memiliki rata-rata IPM sebesar 65,63 %. Menjadi provinsi terendah dari sepuluh provinsi yang ada di Pulau Sumatera. IPM tertinggi diduduki oleh Provinsi Kepulauan Riau yaitu sebesar 72,83 %, diikuti oleh Provinsi Riau 69,83 % dan Sumatera Barat sebesar 68,88 %. Berikut data yang di sajikan :

Table 1.1
perbandingan data IPM dan kemiskinan menurut provinsi
di sumatera tahun 2011-2015

NO	PROVINSI	IPM	KEMISKINAN
1.	Aceh	68,36	18,37
2.	Sumatera utara	68,36	10,60
3.	Sumatera barat	68,88	7,92
4.	Riau	69,83	8,28
5.	Jambi	67,59	8,44
6.	Sumatera Selatan	66,26	13,97
7.	Bengkulu	67,34	17,49
8.	Lampung	65,63	14,87
9.	Bangka Belitung	67,81	5,34
10.	Kepulauan riau	72,83	6,69

Sumber : Badan Pusat Statistik Nasional Tahun 2016

Dilihat dari data di atas kita bisa melihatnya Kemiskinan di Provinsi Lampung menempati urutan ketiga tertinggi diantara provinsi lain di Pulau Sumatera. Situasi ini Intervensi pemerintah melalui program-program yang diperlukan Itu efektif. Kemiskinan bisa sangat mempengaruhi suatu wilayah.

Tabel 1.2

Data pertumbuhan ekonomi menurut
kabupaten/kota provinsi lampung

No	Kabupaten/kota	2011	2012	2013	2014	2015
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						

Sumber : Tinjauan Ekonomi Regional Daerah Otonom di Prov. Lampung 2015.

Jika melihat pertumbuhannya, pada tahun 2015 tercatat sebelas kota/kabupaten yang memiliki pertumbuhan ekonomi diatas provinsi Lampung (5,13 persen. Peran pemerintah dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia adalah dengan menurunkan angka kemiskinan yang terjadi. untuk mensejahterakan masyarakat dengan dibuktikan oleh menurun nya angka kemiskinan.

Kemiskinan juga erat kaitannya dengan permasalahan sosial, dimana kemiskinan perkotaan akan mengakibatkan bertambahnya orang tunawisma dan anak jalanan. Kemiskinan juga terkait dengan akses terhadap pendidikan dan informasi.

B. Rumusan masalah

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana kemiskinan bisa mempengaruhi tingkat Pendidikan di provinsi lampung ?
2. Bagaimana kemiskinan bisa mempengaruhi tingkat Kesehatan di provinsi lampung ?

C. Tujuan penelitian

1. Menganalisis seberapa besarnya pengaruh kemiskinan mempengaruhi tingkat Pendidikan di provinsi lampung ?
2. Menganalisis seberapa besarnya pengaruh kemiskinan mempengaruhi tingkat Kesehatan di provinsi lampung ?

D. Manfaat penelitian

1. Bagi pemerintah lampung dengan tingginya angka kemiskinan, merupakan salah satu alasan untuk mengambil kebijakan- kebijakan yang mampu mengatasi jumlah kemiskinan.
2. Bagi masyarakat umum merupakan bahan dasar/ gambaran dalam melakukan suatu kegiatan perekonomian.
3. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi – informasi tentang data - data penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diungkapkan dalam penelitian ini.

E. Penelitian terdahulu

dalam hal ini perlu dilakukan telaah kepustakaan berupa kajian terhadap penelitian terdahulu. Yaitu ditulis oleh Restuty Anggereny Rumahorbo, tahun 2014 di Universitas Hasanuddin Makassar dengan judul penelitian “Analisis Faktor-Faktor

Yang Mempengaruhi Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Sumatera Utara”. Masalah penelitiannya adalah apa faktor yang mempengaruhi jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini bertujuan untuk Menganalisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Sumatera Utara. Cara pandang kemiskinan ini beranjak dari pendekatan berbasis hak. Pemahaman hak tersebut mengakui bahwa masyarakat miskin mempunyai hak-hak dasar yang sama dengan anggota masyarakat lainnya. Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dan mendapatkan sumber data dari data-data yang di dapat di Masyarakat nya maupun data dari pemerintah.

F. Metode penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan, . Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Prosedur ini menghasilkan temuan yang diperoleh dari data-data yang dikumpulkan dengan menggunakan beragam sarana. Sarana itu meliputi pengamatan (observasi) dan wawancara serta dokumentasi seperti buku dan kaset video. Dengan Menggunakan metode panel data yaitu penggabungan data time series selama kurun waktu lima tahun yaitu tahun 2011 – 2015 dengan data cross section yaitu 15 kota/kabupaten provinsi Lampung.

2. Sumber data

Data primer dari penelitian ini terdiri dari observasi dan wawancara. Peneliti akan melakukan observasi lapangan dan melakukan wawancara kepada informan. Hal tersebut dilakukan agar dapat mengetahui faktor-faktor apa yang menjadi penyebab mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarga. Untuk mendapatkan dan memperoleh data yang akurat, penulis mendatangi perindividu dan tidak jarang ikut serta dalam kegiatan mereka.

3. Teknik pengumpulan data

1.) Observasi

Dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung terhadap Masyarakat yang menjadi informan dalam hal ini meliputi kegiatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh indera.

2.) Wawancara mendalam

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian untuk mendapatkan keterangan lisan secara bercakap-cakap dan bertatap muka dengan dapat memberikan keterangan pada penelitian.

4. Metode analisis data

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis data panel sebagai alat pengolahan dengan menggunakan program E-view

5. Variabel penelitian

Variabel dependen (Y) dalam penelitian ini yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) provinsi Lampung, sedangkan variabel independen terdiri dari (X1) data Kemiskinan dan (X2) data Pertumbuhan Ekonomi.

References

Badan Pusat Statistik Nasional Tahun 2016

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa

Edisi Keempat. Jakarta : Gramedia, 2011.

Firdausy, C. (1994). Analisis Sosial-Ekonomi Pertumbuhan Dan Perkembangan Kota terhadap kemiskinan Dan Kesenjangan pendapatan masyarakat. Kantor Menteri Negara Riset dan Teknologi, Dewan Riset Nasional, Proyek Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi bekerjasama dengan Puslitbang Ekonomi dan Pembangunan-LIPI.

Refina Sari, Faktor Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara, (Skripsi, Ekonomi, Universitas Hasanuddin Makassar, 2015).

Rahmadeni, R., & Nurjannah, N. (2022). Model Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Riau: Menggunakan Regresi Data Panel. KUBIK: Jurnal Publikasi Ilmiah Matematika, 6(2), 98–109. <https://doi.org/10.15575/kubik.v6i2.13598>

Permana, Rizky. "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Timur." Forum Ekonomi: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi, vol. 18, no. 2, 2016, pp. 111-129, doi:10.29264/jfor.v18i2.862.